



Ketika PP No. 18 Tahun 2017 Mendongkrak Penghasilan Wakil Rakyat

KANTONG MAKIN TEBAL, KERJA JANGAN

Sejak Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 disahkan, penghasilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) termasuk di daerah semakin menebal. Kualitas kinerja mereka sudah sepatutnya lebih bagus dari sebelumnya.

SAMPAI saat ini belum ada transparansi secara rinci berapa penghasilan mereka di masing-masing kabupaten/kota. Di DPRD Kota Denpasar misalnya, saat koran ini menanyakan kepada Plt. Sekretaris Dewan Kota Denpasar I Putu Dharma Wiyasa ■

► Baca **Kantong...** Hal 27

Tunjangan Pendongkrak Penghasilan Dewan

- **Dasar Acuan** : PP No. 18 Tahun 2017
- **Perubahan Anggaran** : Anggaran untuk kenaikan tunjangan sesuai APBD perubahan yang mengaku penghasilan daerah
- **Implementasi di Daerah** : Praktik di daerah disesuaikan dengan peraturan bupati/wali kota masing-masing. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, anggaran yang besar memungkinkan

Bersambung ke hal 27...

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

ASAL

■ KANTONG...

Sambungan dari hal 17

sayangnya dia tidak berani membeberkan berapa sebenarnya penghasilan para dewan tersebut.

Penelusuran *Jawa Pos Radar Bali*, penghasilan dewan yang masih menggunakan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2014 dan perubahannya. Menurut sumber koran ini, rata-rata gaji anggota dewan per bulan kurang lebih Rp 10.832.790.

Namun, itu belum ditambah tunjangan perumahan. Ini juga tunjangan para pimpinan berbeda dengan anggota. Untuk ketua DPRD tunjangan perumahan sebesar Rp 19.900.000, wakil ketua DPRD Rp 19.750.000, dan anggota Rp 19.500.000.

Sehingga jika ditotalkan penghasilan yang diterima per bulan seorang ketua DPRD Rp 30.732.790, wakil ketua DPRD sebesar Rp 30.582.790, dan anggota dewan sebesar Rp 30.332.790.

Nah, itu baru gaji per bulan, setelah masa baktinya selesai para dewan juga memperoleh penghasilan yang disebut jasa pengabdian selama lima tahun.

Uang jasa pengabdian ketua

DPRD Rp 12.600.000, Wakil Ketua Rp 10.080.000, dan anggota dewan Rp 9.450.000. Belum lagi masing-masing pimpinan dewan disediakan satu unit mobil dinas, sedangkan anggota dewan hanya diberikan mobil yang sistemnya pinjam pakai.

Hasil penelusuran koran ini, melihat di penjabaran perubahan APBD 2017 untuk anggaran organisasi DPRD Kota Denpasar adanya penambahan anggaran untuk penghasilan DPRD Kota Denpasar. Sebelum perubahan, dianggarkan Rp 22.481.023.300.00 setelah perubahan jadi Rp 33.794.023.300.

Jika diuraikan untuk peningkatan, gaji dan tunjangan sebelumnya dianggarkan Rp 19.079.023.300, di penjabaran perubahan APBD menjadi Rp 21.891.523.300. Tunjangan yang meningkat adalah tunjangan perumahan sebesar 18,56 persen, yang sebelumnya dianggarkan Rp 15.150.000.000 menjadi Rp 17.962.500.000.

Selain itu peningkatan tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD, yang sebelumnya Rp 3.402.000.000 menjadi Rp 5.292.000.000. Yang paling menarik, sebelumnya tidak ada anggaran untuk reses dan

... sambungan dari hal 17

perubahan tunjangan yang besar. Begitu pula sebaliknya

- **Nominal Perubahan** : Belum ada keterangan resmi nilai nominal besarnya tunjangan. Di Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, total penghasilan dengan tunjangan baru bisa mencapai kisaran Rp 100 jutaan (kurang lebih) per bulan
- **Kritik** : Belum ada transparansi

rinci total penghasilan dewan setelah mendapat tunjangan. Perubahan tunjangan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas kinerja dewan dalam membuat kebijakan yang menyejahterakan masyarakat, semakin produktif menelurkan perda yang pro rakyat

GRAFIS: GT DEWANTARA/RADAR BALI

transportasi. Setelah rancangan perubahan ini tunjangan reses dianggarkan Rp 1.323.000.000 dan tunjangan transportasi Rp 5.287.500.000. Jadi dalam perhitungan kenaikan anggaran untuk belanja DPRD Kota Denpasar mencapai 50,32 persen.

Ngurah Gede pun berjanji gaji yang meningkat ini akan dibarengi peningkatan kinerja dewan. Jika ada dewan yang kinerjanya kurang maupun yang malas Badan Kehormatan DPRD harus wajib menegur.

"Ya, kinerja kami *kan* sudah terlihat memberi gaji untuk guru honorer. Ke depannya masih banyak PR yang harus dilakukan," ujarnya.

Sementara dikonfirmasi den-

gan Plt Sekwan I Putu Dharma Wiyasa enggan menyebutkan berapa jumlah penghasilan dewan saat ini. Menurutnya, gaji dewan tidak akan lebih dari gaji di DPRD provinsi.

Saat ditanyakan terkait anggaran belanja DPRD mencapai Rp 33 miliar lebih, lucunya dia malah mengaku tidak memperhatikan jumlah anggaran untuk gaji dan tunjangan DPRD.

Selain itu, dia juga menyebutkan untuk penghasilan dewan juga berdasarkan besaran pendapatan asli daerah (PAD). Sesuai dengan Permendagri 62 Tahun 2017, ada *cluster* tinggi, sedang, dan rendah. Untuk Denpasar masuk dalam *cluster* tinggi.

"Ya, tidak jauh beda dengan

Edisi : Minggu, 27 Agustus 2017

Hal : 17 dan 27



Mengaku Ada "Todongan Sumbangan"

DI Tabanan gaji pokok pimpinan dan anggota DPRD Tabanan memang tidak besar. Bahkan, untuk kelas pimpinan lebih sedikit dari upah minimum Kabupaten (UMK) Tabanan.

Saat ini UMK Tabanan Rp 2.059.965, sedangkan gaji pokok atau uang represen-

tasi ketua dewan sebesar Rp 2,1 juta setara dengan gaji pokok bupati. Tapi, jangan hanya lihat itu. Bahkan, gaji pokok wakil ketua dan anggota lebih kecil lagi, masing-masing 80 persen dan 75 persen dari gaji pokok bupati atau ketua dewan ■

► Baca Mengaku... Hal 27

Sehari Bisa Empat Undangan

■ MENGAKU...

Sambungan dari hal 17

Tapi, jangan dilihat dari kecilnya gaji pokok tersebut. Kalau dilihat keseluruhan penghasilan dewan, gaji pokok ini tak seberapa. Sebab, pimpinan dan anggota DPRD, selain mendapat gaji pokok atau uang representasi juga mendapat penghasilan dari beragam tunjangan yang nilainya bisa puluhan kali dari gaji pokok tersebut.

Total, di APBD 2017 ini saja, itu semua menghabiskan anggaran Rp 13.261.659.900. Kalau dibagi rata untuk 40 anggota DPRD Tabanan, maka per anggota mendapat Rp 27,6 juta per bulan. Walau dalam kenyataannya, penghasilan ini mesti sama, alias proporsional sesuai jabatan yang diemban di DPRD Tabanan. Tentu, pendapatan paling besar dinikmati pimpinan DPRD, dibanding anggota.

Penghasilan itu belum seberapa. Sebab, anggota DPRD Tabanan juga mendapat pemasukan dari kegiatan-kegiatan lain. Terutama kegiatan kunjungan kerja baik di dalam daerah maupun luar daerah. Untuk kegiatan luar daerah saja, rata-rata per bulan berangkat 3 kali. Sekali berangkat rata-rata menghabiskan tiga hari. Sehari perjalanan dinas di luar daerah, dapat uang saku Rp 2,3 juta, dan pimpinan dewan Rp 2,8 juta per hari. Dengan demikian, sebulan bisa menghasilkan Rp 20,7 juta

bagi anggota dan Rp 25,2 juta untuk pimpinan dewan. Itu belum termasuk kegiatan-kegiatan lain, baik rapat-rapat maupun kunjungan di dalam daerah.

Itu juga belum ada artinya. Sebab, di tahun 2017 ini penghasilan anggota DPRD Tabanan akan meroket seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Dalam PP ini, yang terbaru akan ada kenaikan tunjangan komunikasi intensif, juga akan ada item penghasilan baru berupa tunjangan operasional, uang reses, dan tunjangan transportasi. Dan, kebetulan juga di Tabanan akan ada perubahan peraturan bupati (Perbup) terkait tunjangan perumahan pimpinan dan anggota dewan.

Tunjangan komunikasi intensif akan mengalami kenaikan dari tiga kali uang representasi ketua menjadi tujuh kali. Yakni dari Rp 6,3 juta menjadi Rp 14,7 juta, atau naik Rp 8,4 juta. Adanya uang reses yang juga sebesar tujuh kali uang representasi ketua dewan. Uang reses ini diberikan setiap melakukan reses, yakni tiga kali dalam setahun. Dan, yang terbaru lagi pimpinan dan anggota Dewan Tabanan juga akan mendapat kenaikan tunjangan perumahan dari Rp 15 juta untuk anggota, Rp 16 juta wakil ketua, dan Rp 18 juta untuk ketua, men-

jadi berturut-turut Rp 26 juta, Rp 27 juta, dan Rp 28 juta per bulan.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Perubahan APBD 2017, kenaikan beragam tunjangan anggota dewan juga sudah terakomodasi. Bila di APBD induk 2017 hanya disediakan anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota DPRD Tabanan Rp 13.261.659.900, di Perubahan APBD 2017 naik sebesar Rp 7,98 miliar atau menjadi Rp 21,24.

"Angka itu belum *fixed*. Itu angka ancer-ancer. Angka *fixed*-nya nanti sesuai dengan Perbup yang sedang proses di provinsi," jelas Sekretaris DPRD Tabanan I Gede Susila Jumat lalu.

Sekretaris Komisi I DPRD Tabanan Gusti Omar Dani mengaku pengeluaran anggota DPRD selama ini sangat besar. Untuk kegiatan sehari-hari dan keluarga saja sudah cukup banyak. Belum lagi, anggota dewan sering ditodong bantuan oleh masyarakat.

Dia menyebut kegiatan adat, lomba-lomba, bazaar, hari raya keagamaan, orang sakit, perkawinan, dan sebagainya. "Contoh, Agustusan kemarin. Saya sampai pinjam dana Rp 50 juta untuk warga yang mohon bantuan perayaan Agustusan," kata Omar Dani.

"Kalau Rp 50 juta, untuk Agustusan kemarin, saya malah kurang. Lebih dari itu," timpal Wakil Ketua DPRD Tabanan Ni Nengah Sri Labantari lantas tertawa ketika dikonfirmasi Jumat lalu.

Sri mengakui, dengan mengandalkan gaji dan tunjangan selama ini, banyak anggota dewan yang lesu darah. Sebab, antara pemasukan dan pengeluaran tak seimbang. Bahkan, seringkali minus.

"Dengan adanya kenaikan ini, mudah-mudahan anggota dewan yang lesu darah ini jadi termotivasi dan lebih semangat dalam meningkatkan kinerjanya untuk rakyat," tuturnya.

Omar Dani tak menampik penghasilan anggota DPRD Tabanan, khususnya dari Fraksi PDIP tidak sepenuhnya masuk kantong pribadi. Sebab, ada juga potongan -potongan kepada partai. Meski demikian ia enggan menyebutkan nominalnya. "Apakah (potongan gaji) akan naik setelah kenaikan ini, saya tidak punya wewenang untuk mengatakan. Silakan ke pimpinan DPC PDIP Tabanan," jelasnya.

Dia mengatakan sudah pasti dengan kenaikan penghasilan ini akan ada alokasi untuk masyarakat. Namun, dia tidak bisa memastikan berapa besarnya. Karena, kegiatan di masyarakat juga tidak menentu jumlahnya. "Kalau diundang, saya tidak pernah tidak hadir. Kalaupun tidak hadir, saya titipkan dananya. Misalkan ada lomba mancing dalam sehari empat tempat. Mungkin dua tempat bisa saya hadir. Yang dua sumbangannya saya titipkan, pungkas dia. (yoyo raharyo/pit)

Edisi : Minggu, 27 Agustus 2017

Hal : 17 dan 27



Bikin Ngos- Ngosan Atur Keuangan

PEMERINTAH daerah dibuat *ngos-
ngosan* dalam mengatur keuangannya
buntut dari penerapan PP 18/2017,
tentang kenaikan tunjangan pimpinan
dan anggota dewan. Pemprov Bali
misalnya sekarang harus berpikir
keras mencari uang Rp 27 miliar pada
APBD perubahan 2017 agar bisa
memenuhi kenaikan tunjangan 55
anggota DPRD Bali.

Dampaknya, sejumlah kebijakan dan
program pun diperas serta diramping-
kan. Ini dilakukan agar bisa memberi
kenaikan tunjangan hingga lima kali lipat
pada wakil rakyat yang terhormat ■

► Baca **Bikin...** Hal 27

Edisi : Minggu, 27 September 2017

Hal : 27 dan 27

APBD Perubahan Masih Defisit

■ BIKIN...

Sambungan dari hal 17

Informasi yang digali koran ini di internal DPRD Bali, dengan kenaikan tunjangan lima kali lipat, maka pendapatan dewan tembus Rp 65 juta/bulan. Sebelumnya pendapatan mereka berkisar Rp 35 juta/bulan. Dengan berlakunya PP 18/2017, maka legislator Renon mendapat tambahan sekitar Rp 30 juta.

Tambahan tersebut meliputi tunjangan transportasi, tunjangan reses, dan tunjangan komunikasi insentif. Ironisnya, setelah tunjangan naik kinerja dewan tak kunjung membaik.

Gedung dewan kerap sepi tak ubahnya hari biasa. Hanya beberapa anggota dewan yang memang terbiasa rajin ke kantor yang tampak.

Pendapatan lebih banyak diterima unsur pimpinan dewan. Uang representasi atau gaji pokok yang awalnya Rp 3 juta per bulan, naik menjadi Rp 15 juta per bulan. Gaji ketua dewan disetarakan dengan gaji gubernur Bali.

Yang menarik, eksekutif atau pemerintah sendiri terkesan tidak mau mengambil risiko. Alih-alih menolak, pemerintah berusaha agar aturan tersebut bisa terealisasi. Dalihnya adalah menjalankan amanat regulasi peraturan pemerintah.

"Mengacu pada ketentuan yang ada, kami harus menyamakan persepsi dengan dewan," ujar Kepala Bappeda Provinsi Bali Putu Astawa didampingi Kepala Biro Keuangan dan

Aset Daerah IB Arda ditemui baru-baru ini di lobi DPRD Bali.

Arda menambahkan, kemampuan keuangan daerah Bali masuk kategori sedang karena didapat angka Rp 3,3 triliun. Kemampuan keuangan daerah didapat dari PAD, bagi hasil dan DAU. Selanjutnya pendapatan umum dikurangi biaya gaji selama dua tahun terakhir hingga didapat sedang. "Untuk eksekusi anggaran kami menunggu pergub yang masih digodok Biro Hukum," tukasnya.

Anehnya, meski nyata-nyata pendapatan meroket, anggota DPRD Bali masih merasa kurang. Mereka menganggap Bali seharusnya masuk kategori daerah pendapatan tinggi, sehingga kenaikan bisa tujuh kali. Namun, Mendagri menetapkan Bali sebagai daerah dengan kemampuan sedang. Anggota dewan, khususnya Banggar pun ramai-ramai memprotes Mendagri.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Banggar DPRD Bali Nyoman Adnyana mengatakan pihaknya tidak asal protes. Tapi, memberi masukan pada Mendagri dalam menentukan klasifikasi daerah. "Mereka juga baru mengerti persoalan kondisi daerah masing-masing. Kami tidak sekadar protes dan mengkritisi tapi juga memberi solusi," kata Adnyana, saat dikonfirmasi Kamis lalu (24/8).

Terkait kekhawatiran anggota dewan provinsi akan kalah pendapatan dengan Dewan Badung, Adnyana membantah. Katanya, penghasilan dewan

kabupaten/kota harus tetap di bawah provinsi. "Sebenarnya Badung protes kami, karena mereka terkunci. Pendapatan dewan kabupaten tidak boleh lebih tinggi daripada provinsi. Kalau sama boleh, kalau lebih tinggi tidak boleh," tegas politisi asal Bangli itu.

Sementara anggota Komisi II DPRD Bali AA Ngurah Adi Ardhana mengatakan, kenaikan insentif merupakan sesuatu yang wajar karena ada dasarnya, PP No 18/2017 yang baru saja ditetapkan. "Suatu hal yang wajar dan positif melihat jabatan dan beban tanggung jawab seorang anggota legislatif," ujar Ardhana.

Menurut Ardhana, secara aktual tugas legislasi pengawasan anggaran memiliki beban kerja tinggi di tengah upaya pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Politisi asal Puri Gerenceng, ini berharap kenaikan insentif disertai peningkatan kinerja dan kemampuan anggota dewan. "Semua peningkatan ini juga menyesuaikan kemampuan daerah, hingga memiliki tingkat kepantasan sesuai peraturan pemerintah," sambungnya.

Meski menjalankan amanat peraturan pemerintah, sejatinya kondisi APBD Pemprov Bali sedang memprihatinkan. APBD perubahan Provinsi Bali 2017 juga masih mengalami defisit sebesar Rp 178 miliar. Defisit tersebut disebabkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat bersifat dinamis. (sandijaya maulana/pit)

Edisi

MINGGU, 27 September 2017

Hal

29